



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Polri Berkukuh Lanjutkan Tim Transformasi
Tanggal	: Jumat, 26 September 2025
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 3

Polri Berkukuh Lanjutkan Tim Transformasi

Kapolri mengundang 31 pakar dan akademisi lintas bidang untuk dimintai pandangan dan masukan guna reformasi kepolisian. Kini, Polri juga tengah memetakan persoalan internal untuk segera dibenahi.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI atau Polri berkukuh melanjutkan Tim Transformasi Reformasi internal dengan alasan ingin memenuhi harapan publik sekaligus mendukung Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto. Selain memetakan masalah, Polri juga mulai menjaring masukan dari para pakar dan akademisi lintas bidang agar reformasi di Korps Bhayangkara itu berjalan optimal.

Presiden Prabowo telah merancang pembentukan Komite Reformasi Polri setelah melantik Ahmad Dofri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Keterbukaan Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. 17 September lalu, Pihak Istana juga sudah mengajak sejumlah tokoh dari negarawan untuk bergabung. Keputusan presiden (kepres) terkait pembentukan Komite Reformasi Polri ini akan diterbitkan setelah Presiden kembali dari latihan militer ke luar negeri.

Namun, sebelum komite reformasi terbentuk, Polri sudah lebih dulu membentuk Tim Transformasi dan Reformasi Kepolisian. Pada 17 September, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pembentukan tim itu melalui surat perintah bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.I./2025. Melalui surat itu pula, Kapolri menunjuk Kepala Lemhannas Diklat Polri Komisaris Jenderal Chrysnamurti Dwilaksana sebagai Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri.

Bukan hanya itu, tim ini bahkan sudah mulai meminta pandangan dan masukan publik terkait reformasi kepolisian. Pada Rabu (24/9/2025), Kapolri mengundang 31 pakar dan akademisi dari eksternal kepolisian untuk menjaring masukan terhadap reformasi Polri.

Pertemuan yang digelar di ruang Pusat Pengendalian Krisis Mabes Polri itu disebut sebagai rapat akelerasi transforma-



Defile personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upacara Hari Bhayangkara ke-79 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

si Polri. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolri itu merupakan tindak lanjut dari pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri.

Saat memberikan keterangan pers, Kamis (25/9), Listyo menyatakan, Polri mengandeng 31 pakar dan akademisi lintas bidang sebagai tim akelerasi.

Adapun pertemuan digelar sebagai sarana untuk menyampaikan saran dan kritik dari berbagai pihak agar proses reformasi internal kepolisian untuk menjaring masukan terhadap reformasi Polri.

Para tokoh yang diundang diminta memberikan masukan terhadap kebijakan Presiden untuk mereformasi kepolisian.

Bukan tim tandingan

Dalam rapat akelerasi itu, Kapolri menjelaskan bahwa tim tersebut bukan tandingan Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden. Tim internal Polri disebutnya sebagai salah satu bentuk respons cepat

terhadap kebijakan Presiden untuk mereformasi kepolisian.

Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri hadir untuk mendukung komite yang akan dibentuk Presiden. Tim itu akan melakukan pemetaan masalah di internal Polri yang nantinya dibutuhkan oleh Komite Reformasi Polri.

"Yang jelas, polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi," ujar Listyo.

Agar tim internal

Dalam rapat akelerasi itu, Kapolri menjelaskan bahwa tim tersebut bukan tandingan Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden. Tim internal Polri disebutnya sebagai salah satu bentuk respons cepat

terhadap kebijakan Presiden untuk mereformasi kepolisian.

Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri hadir untuk mendukung komite yang akan dibentuk Presiden. Tim itu akan melakukan pemetaan masalah di internal Polri yang nantinya dibutuhkan oleh Komite Reformasi Polri.

"Pada saatnya kami di sini ingin memenuhi harapan publik dan melakukan upaya untuk menjemput bola. Tim akelerasi ini bergerak bersama melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi," tuturnya.

Sedangkan pakar yang diminta memberikan masukan di antara

nya adalah pemerhati kepolisian, Hermawan Sulistyadi dan Bambang Rukminanto. Selain itu, Rustika Herlambang Alfito Deanova Ginting serta Devie Rahmawati untuk bidang media dan komunikasi. Ada pula Hendardi, Poenoky Indarti, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Adrianus Elkasta Sembiring Mellala untuk bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminanto, mengungkapkan, sebagian besar tokoh yang diundang merupakan penasihati ahli Kapolri. Karena itu, ia mengingatkan agar tim internal itu bukan formalitas sekadar untuk menjawab dinamika sosial politik saat ini.

Selain itu, Bambang juga menyampaikan agar reformasi kepolisian dijalankan bukan untuk mengembalikan Polri di bawah TNI seperti masa lalu. Lebih dari itu, reformasi hendaknya dilakukan untuk mendirikan institusi Polri semakin profesional, independen, dan akuntabel.

Sementara secara terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Wursten, menilai, Tim Transformasi Reformasi Polri dibentuk seba-

gai wujud komitmen institusi tersebut untuk mereformasi diri. Menurut dia, tim internal Polri itu tidak akan bertabrakan dengan Komite Reformasi Polri yang nantinya dibentuk oleh Presiden.

"Tekniskinya, kan, itu internal Polri bisa mempersiapkan dirinya untuk memberikan dukungan terhadap tim yang dibentuk Presiden. Jadi, ya, itu tidak masalah. Polri sendiri berkedudukan di bawah Presiden. Jadi, ketika tim reformasi dibentuk Presiden, Polri sudah pasti harus mengikuti," paparnya.

Revisi UU Polri

Seiring dengan pembentukan tim reformasi kepolisian oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga akan merencanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pemerintah dan DPR telah sepakat memasukkan revisi UU Polri sebagai RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengingatkan para pembentuk undang-undang untuk berhati-hati menanggapi wacana reformasi kepolisian. Pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik bermakna, baik dengan perumusan maupun pembahasan RUU Polri.

"Pembahasan RUU jangan sampai tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan seterusnya. Apalagi, draft RUU yang dimuat sebelumnya cenderung memperluas kewenangan Polri," tuturnya.

Salah satu usulan tambahan kewenangan yang disoroti adalah pengawasan ruang siber. Tidak hanya bisa melakukan penyadapan, Polri juga bisa memblokir hingga memutus jaringan internet. Usul tambahan kewenangan semacam itulah yang menurut Usman harus dibahas dengan hati-hati. (NAD/RTG)